

INTEGRASI NILAI – NILAI ISLAM DAN BUDAYA ORGANISASI DI BAPPEDA ACEH BARAT DALAM KERANGKA RASIONALITAS BIROKRASI

Olta Meniza¹, Ligar Abdillah², Sopar³

Universitas Teuku Umar^{1,2,3}

oltamz02@gmail.com¹, ligarabdillah@utu.ac.id², sopar@utu.ac.id³

Abstract

BAPPEDA is a regional agency that carries out the task of coordinating the preparation, approval, and evaluation of the implementation of regional development plans. This research was conducted to examine how Islamic values are applied in the West Aceh BAPPEDA, given the very high workload, and how religious normative values are integrated into administrative practices and bureaucratic behavior. This study contributes to the field of organizational sociology by demonstrating that the integration of Islamic values into organizational culture establishes normative mechanisms that strengthen institutional performance. The method used in this research is qualitative, which can reveal community life, history, behavior, organizational functionality, social movements, and kinship relationships. Data was obtained through several data collection processes, namely observation, interviews, and documentation. The results of this research indicate that the integration of Islamic values, such as reciting prayers before starting work, being honest in work, being responsible, and being open to the regional development planning process, is being implemented. The application of Islamic values in West Aceh BAPPEDA demonstrates a bureaucratic model that is not only efficient but also oriented toward a balance between work rationality and religious morality, ultimately strengthening the organization's overall legitimacy and effectiveness. Organizational culture and the integration of Islamic values at the West Aceh BAPPEDA go hand in hand in shaping a bureaucracy that is both rational and morally valuable.

Keywords: Islamic values, organization, bureaucracy

1. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu lembaga penting dalam pemerintahan daerah. BAPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasi penyusunan, pengadilan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengarahkan pembangunan daerah dan memiliki tuntutan birokrasi yang sangat tinggi (Siregar, 2020). BAPPEDA menjunjung tinggi integritas rasionalitas birokrasi terbaik dan melaksanakan kinerja sesuai dengan aturan dan tujuan dari instansi. BAPPEDA Aceh Barat memiliki tuntutan

kerja yang tinggi dan tetap mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam birokrasi nya. Institusi ini bukan hanya sebagai instansi yang memiliki fungsi sebagai perancang pembangunan daerah, melainkan juga sebagai lembaga yang mengimplementasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan birokrasi. Penerapan nilai-nilai Islam di institusi pemerintah ini bukan hanya untuk mengikuti aturan, tetapi penerapan tersebut dilakukan agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai positif terhadap para pegawai yang ada di dalamnya (Makmur et al., 2025).

Pada umumnya BAPPEDA cenderung memiliki peningkatan kinerja setiap tahunnya yang mengharuskan untuk memberikan kinerja yang baik dan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan daerah. BAPPEDA memiliki tugas untuk membantu walikota atau bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan serta penelitian dan pengembangan daerah (Pebriansyah et al., 2024). Pegawai yang bertugas di institusi ini tidak hanya bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan, tetapi juga harus mengelola berbagai program dan anggaran yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Pegawai juga harus memahami peran mereka dalam konteks yang lebih besar dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja mereka. Jam kerja di institusi tersebut diatur oleh regulasi yang mengharuskan seluruh pegawai bekerja selama 37,5 jam per minggu (Ruki, 2024). Pada situasi tertentu, sebagian pegawai harus bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan karena tuntutan tugas yang tinggi dan tidak jarang para pegawai dihadapkan dengan tugas yang menumpuk atau tenggat waktu yang ketat dan singkat untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan (Sutrisno et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan di BAPPEDA Aceh Barat dengan beban kerja yang sangat tinggi dan bagaimana nilai-nilai normatif agama dipadukan ke dalam praktik administratif dan perilaku birokrasi. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana menggabungkan nilai-nilai Islam dan budaya organisasi di dalam rasionalitas birokrasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian rasionalitas birokrasi dalam kerangka sosiologis sekaligus melengkapi teori rasionalitas birokrasi Max Weber dalam dimensi moral dan etika keislaman. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkuat pemahaman tentang budaya organisasi yang tidak hanya dibentuk oleh nilai manajerial universal, tetapi juga oleh norma agama dan kearifan lokal. Penelitian ini memperkuat kajian sosiologi organisasi dengan menganalisis bagaimana integrasi nilai Islam dalam budaya organisasi membentuk mekanisme normatif yang memengaruhi kinerja kelembagaan dalam konteks institusi pemerintah.

BAPPEDA Aceh Barat berada di wilayah otonomi khusus yang berbasis syariat Islam, sehingga memudahkan organisasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam pada organisasi. Penerapan nilai-nilai Islam bertujuan untuk menciptakan rasionalitas birokrasi yang memiliki ciri khas, kontekstual, dan relevan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Penerapan nilai-nilai Islam di dalam organisasi juga membangun etos kerja yang positif, yaitu menekankan pada kedisiplinan waktu. Kerja keras dan keikhlasan terhadap

signifikansi kinerja pegawai di BAPPEDA Aceh Barat dapat menumbuhkan sifat yang lebih jujur, adil, bertanggung jawab dan amanah. Selain itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam organisasi dapat memperkuat budaya organisasi sehingga menciptakan kebersamaan dan solidaritas yang lebih tinggi antara pegawai.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Nilai-Nilai Islam dalam Organisasi

Penerapan nilai-nilai Islam dalam organisasi menguntungkan hubungan antara anggota organisasi dan pihak eksternal. Menurut beberapa kritikus menerapkan nilai-nilai agama dalam organisasi dapat menyebabkan konflik, terutama dalam organisasi yang memiliki keberagaman agama (Nuzulla & Mubarok, 2023). Di sisi lain, penerapan nilai-nilai Islam dalam sebuah organisasi dapat berpengaruh pada tindakan dan keputusan. Tindakan dan keputusan pemimpin diambil berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab sehingga berdampak baik terhadap organisasi (Nahwan et al., 2024). Nilai-nilai Islam turut memengaruhi budaya dalam organisasi dan digunakan sebagai dasar pembentukan budaya organisasi. Sebagai contohnya nilai-nilai yang dipandang sesuai dalam pembentukan budaya organisasi adalah nilai ikhlas, amanah, dan jama'ah (Yasir & Maulida, 2022).

Nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam organisasi dapat menjadi panduan etis yang mengarahkan perilaku setiap anggota sesuai dengan aturan syariat Islam (Saleh, 2024). Penerapan nilai Islam seperti amanah, kejujuran, dan keadilan dalam organisasi merupakan suatu keharusan yang ditanamkan pada setiap anggota. Integrasi nilai-nilai Islam dalam organisasi tentu memperkuat dimensi etis dalam pengambilan keputusan dan keharmonisan sosial dalam organisasi. Organisasi yang menerapkan nilai-nilai Islam tidak hanya menumbuhkan kepercayaan internal, namun juga menciptakan nilai moral yang kokoh (Yusuf et al., 2024).

BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berfungsi untuk membantu gubernur atau kepala daerah dalam menentukan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaannya (Ajizah et al., 2021). Institusi ini harus berperan aktif, efektif dan efisien dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam menciptakan kerangka pembangunan daerah yang kuat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran BAPPEDA sangat menentukan arah pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah (Nasir, 2023). Selain itu, BAPPEDA juga dapat diartikan sebagai lembaga teknis daerah dalam bidang penelitian dan perencanaan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Hadirnya BAPPEDA yaitu sebagai pemerintah yang berhak dan berwenang untuk merencanakan

pembangunan di suatu daerah, pengendalian pembangunan daerah, pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah antara daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta dalam dan luar negeri (Fadila et al., 2021).

BAPPEDA Aceh Barat bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan di berbagai bidang, termasuk perencanaan administrasi, sosial dan budaya, perencanaan perekonomian, perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah, serta perencanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah. BAPPEDA juga bertanggung jawab menyelenggarakan program atau kegiatan di setiap bidang (Ajizah et al., 2021). Salah satu tugas penting institusi ini adalah menyusun rencana strategis yang sejalan dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut institusi ini perlu melakukan komunikasi dengan banyak pihak, baik di dalam maupun di luar organisasi (Sinaga, 2024). Membangun komunikasi tersebut sangat diperlukan untuk memastikan program dan kegiatan yang dirancang di BAPPEDA dapat berjalan dengan baik dan efisien (Limbong, 2021). Para pegawai diharapkan mampu bekerja di bawah tekanan dengan pekerjaan yang cukup memadai, bahkan tidak jarang mereka bekerja di luar jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat.

Rasionalitas Birokrasi

Reformasi birokrasi yang berlangsung di Indonesia mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik (Nasura, 2025). Hal ini sesuai dengan konsep rasionalitas birokrasi Max Weber yang menyatakan bahwa sistem organisasi dijalankan dengan aturan formal dan hierarki yang jelas untuk mencapai kinerja efisien. Dalam konteks Aceh, reformasi tersebut harus mempertimbangkan kekhususan daerah, termasuk nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat. Integrasi nilai Islam ke dalam budaya birokrasi menjadi jalan tengah untuk membangun sistem pemerintahan di Aceh. Hal ini dapat dilihat pada sejumlah kebijakan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai religius di sejumlah instansi pemerintah (Rizki, 2025). Birokrasi merujuk pada sistem administrasi atau manajemen yang memiliki karakteristik khusus yang mencakup dalam aturan yang tertulis, seperti pembagian kerja yang spesifik, terarah, dan rasional (Devi et al., 2023).

Birokrasi memiliki prinsip yaitu pembagian tugas yang spesifik, aturan tertulis, impersonalitas, hierarki yang terstruktur dengan baik, dan rasionalitas (Solong & Yadi, 2021). Penerapan norma-norma keislaman ke dalam birokrasi pada pemerintahan di Aceh termasuk dalam budaya organisasi pada rasionalitas birokrasi yang menjadi aspek terpenting dalam membedakan BAPPEDA Aceh dengan daerah lain yang ada di Indonesia (Darlian et al., 2025). Birokrasi memiliki konsep tipe ideal yang berkontribusi secara penting terhadap organisasi dan menciptakan gambaran tentang sebuah organisasi yang memenuhi standar rasionalitas dan efisiensi. Konsep ideal birokrasi adalah sebuah pandangan yang ideal dan mungkin sulit dipraktikkan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsipnya, organisasi dapat berjalan dengan baik

dan terarah, sehingga prinsip birokrasi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dalam sebuah organisasi (Anas & Hanani, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melihat tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Islam di BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat dengan rasionalitas birokrasi yang sangat tinggi. Penelitian ini dilaksanakan di BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat yang merupakan salah satu instansi penting dalam pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat. Lokasi ini memiliki potensi yang tinggi untuk meneliti terkait dengan integrasi nilai-nilai Islam dalam organisasi karena BAPPEDA Aceh Barat memiliki integritas yang cukup berdampak pada daerah Aceh Barat, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam organisasi. Sekretaris Badan BAPPEDA Aceh Barat juga ikut serta dalam memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan dan penerapan nilai-nilai Islam dalam organisasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, dan pergerakan sosial. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang penerapan nilai-nilai Islam ke dalam budaya organisasi di BAPPEDA Aceh Barat dengan menggunakan pendekatan rasionalitas birokrasi dari Max Weber. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini dilakukan pada tujuh pegawai BAPPEDA Aceh Barat sebagai informan. Beberapa informan tersebut merupakan ASN yang sudah bekerja selama lebih dari 17 tahun dan ada juga yang memiliki pengalaman bekerja pada beberapa instansi lainnya. Sumber data merujuk pada beberapa jurnal atau artikel ilmiah terdahulu yang digunakan untuk mendukung data dalam artikel ini. Peneliti juga melihat beberapa data di internet atau di media sosial seperti di laman Instagram @Bappedakabacehbarat terkait dengan kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan nilai-nilai Islam, serta berita yang disampaikan oleh gubernur Aceh dan bupati Aceh Barat atau pemerintah setempat.

Data diperoleh melalui beberapa proses pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan yang tidak hanya melakukan pengamatan, tetapi juga ikut serta dalam kegiatan yang mengandung nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh pegawai di dalam organisasi. Wawancara dilakukan bersama Aparatur Negeri Sipil (ASN) di instansi

untuk mendapatkan informasi atau data yang penting terkait dengan kegiatan yang selama ini dilakukan dengan penerapan nilai-nilai Islam. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan cara menelaah dokumen-dokumen, seperti peraturan perundang-undangan dan data tertulis lainnya yang relevan masalah penelitian seperti Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025.

Adapun analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana penerapan nilai-nilai Islam mendukung perencanaan pembangunan. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data yang dilakukan dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, serta memfokuskan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data adalah menampilkan hasil temuan penelitian dalam bentuk narasi sesuai dengan fokus kajiannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah direduksi sehingga diperoleh pemahaman bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam organisasi mampu memperkuat prinsip rasionalitas birokrasi (Amrides, 2019).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Etos Kerja BAPPEDA

BAPPEDA dikenal dengan etos kerja yang sangat tinggi, memiliki sistem yang ditandai dengan aturan, hierarki, dan prosedur yang jelas. Pegawai BAPPEDA cenderung memiliki etos kerja yang positif melalui kedisiplinan dalam menaati jam kerja dan mematuhi peraturan birokrasi yang ada, walaupun masih memiliki beberapa kendala dalam menyelesaikan pekerjaan disebabkan waktu yang singkat. BAPPEDA Aceh Barat memiliki tuntutan kerja yang cukup besar, sehingga jam kerja pegawai juga cukup fleksibel dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Realita ini disampaikan oleh salah satu pegawai, yaitu: "Pekerjaan yang ada di BAPPEDA sangat banyak, jam kerja sangat fleksibel sehingga waktu hanya habis di kantor, terlebih dalam kegiatan musrembang, renstra itu memang sampai malam." (Wawancara, 11 Juli 2025).

BAPPEDA memiliki tuntutan kerja yang tinggi, walaupun begitu, pegawai BAPPEDA terus mengupayakan untuk memberikan kinerja terbaik dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan amanah. Etos kerja yang dihasilkan oleh pegawai BAPPEDA berdampak positif terhadap instansi, seperti mendapatkan klaim dari instansi lain bahwa pegawai yang ada di BAPPEDA kompeten dalam melaksanakan berbagai pekerjaan sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Etos kerja pegawai juga berpengaruh terhadap karier pegawai yang semakin bagus. BAPPEDA memiliki jam kerja yang cukup fleksibel, sehingga sebagian pegawai bekerja hingga malam hari untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Walaupun begitu, para pegawai tetap memberikan kinerja terbaik mereka dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dan berbagai kegiatan.

Etos kerja yang dimiliki oleh pegawai yang ada di BAPPEDA mencerminkan komitmen tinggi terhadap tugas dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah,

seperti dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan lainnya. BAPPEDA Aceh Barat memiliki etos kerja yang mencerminkan semangat profesionalitas, disiplin, dan tanggung jawab tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah. Setiap pegawai berkomitmen kuat terhadap kualitas hasil kerja yang dapat dilihat dari kepatuhan terhadap birokrasi, ketepatan waktu, dan kesediaan bekerja di luar jam kerja. Etos kerja ini menekankan pada kinerja yang patuh terhadap aturan, hierarki, dan efisiensi.

Budaya Organisasi

BAPPEDA memiliki budaya organisasi yang berorientasi pada prinsip-prinsip birokrasi rasional dan efisien. BAPPEDA adalah lembaga perencanaan pembangunan daerah yang memiliki budaya organisasi yang dibangun atas profesionalitas, hierarki struktural yang jelas, dan sistem kerja. Budaya kerja BAPPEDA Aceh Barat berorientasi pada visi dan misi pembangunan daerah yang diwujudkan melalui penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dengan berlandaskan prinsip rasionalitas birokrasi. Selain itu budaya organisasi di BAPPEDA juga menekankan nilai profesionalitas, nilai kedisiplinan, akuntabilitas, serta transparansi dalam setiap proses merancang perencanaan pembangunan.

BAPPEDA memiliki peran penting sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki budaya kolaborasi, koordinasi, dan musyawarah yang menjadi ciri khusus dalam setiap penyusunan perencanaan. Dalam konteks daerah Aceh, budaya organisasi di BAPPEDA turut dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang tercermin dalam etika kerja serta dalam pengambilan keputusan. Para pegawai yang ada di dalamnya mengedepankan prinsip nilai kedisiplinan, keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Pada proses Musrembang, BAPPEDA menampilkan budaya partisipasi yang sangat menonjol yang menghimpun aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan keterbukaan organisasi dalam menyerap gagasan pembangunan secara partisipatif dan terbuka.

Dengan demikian, BAPPEDA memiliki budaya organisasi yang terbilang sangat kooperatif. Budaya organisasi dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai seperti nilai lokal, nilai kedisiplinan, dan nilai Islam. Struktur kerja di dalam organisasi menerapkan prinsip bahwa setiap pegawai memiliki peran dan tanggung jawab yang memiliki aturan jelas dan sesuai dengan konteksnya. BAPPEDA berpegang teguh pada kebiasaan dan kesepakatan yang dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam setiap proses perencanaan pembangunan di BAPPEDA, dapat menumbuhkan budaya kolaboratif dan partisipatif melalui berbagai kegiatan seperti Musrembang yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, budaya organisasi di BAPPEDA mencerminkan perpaduan antara birokrasi rasional, nilai religius, dan semangat pelayanan publik.

Integritas nilai-nilai Islam

Penerapan nilai-nilai Islam pada sistem kerja di dalam organisasi merupakan kegiatan positif yang dilakukan dan dapat berdampak pada hasil kinerja pegawai. Bentuk-bentuk nilai Islam berupa membaca doa sebelum memulai kerja, jujur dalam bekerja, bertanggung jawab, serta memiliki keterbukaan terhadap proses perancangan program. Musrembang merupakan kegiatan yang dilakukan beberapa waktu lalu yang melibatkan berbagai pihak, sehingga hal tersebut mencerminkan nilai keterbukaan terhadap semua orang. Integrasi nilai Islam dalam organisasi terbukti dengan adanya aturan yang diinstruksikan oleh Gubernur Aceh nomor 01/INSTR/2025 yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat menghentikan seluruh aktivitas dan segera melaksanakan shalat berjamaah ketika azan berkumandang. Seluruh pegawai juga diwajibkan untuk melaksanakan shalat fardhu berjamaah di masjid, mushala, meunasah, atau tempat ibadah lainnya. Beberapa informan menjelaskan:

“Benar bahwa adanya instruksi oleh Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Barat terkait dengan menghentikan seluruh kegiatan di saat adzan berkumandang oleh seluruh instansi dan masyarakat. Kami juga menerapkan nilai Islam di dalam kegiatan sehari-hari seperti membaca doa ketika mulai bekerja, bersikap terbuka dan adil” (Wawancara, 11 Juli 2025).

Instruksi yang diberikan oleh pemerintah memudahkan BAPPEDA Aceh Barat untuk menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam organisasi dan tetap menjunjung integritas kerja yang baik. Penerapan nilai-nilai Islam terus diupayakan di dalam budaya organisasi BAPPEDA. Pegawai menerapkannya dengan membaca doa sebelum memulai pekerjaan, bersikap adil dan terbuka dalam setiap kegiatan daerah, serta terus mengupayakan kinerja terbaik untuk daerah.

Penerapan nilai-nilai Islam sangat berpengaruh terhadap etos kerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam melaksanakan kerja. Bentuk upaya penerapan nilai-nilai Islam dalam organisasi yaitu terbuka saat melakukan berbagai kegiatan, contohnya seperti musrembang, memberikan jeda bekerja saat sudah memasuki waktu shalat, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Penerapan nilai-nilai Islam menimbulkan dampak positif terhadap pegawai BAPPEDA seperti keadilan, profesionalitas, serta tanggung jawab moral. BAPPEDA Aceh Barat berada di wilayah syariat Islam yang menjunjung tinggi nilai agama, sehingga mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam organisasi merupakan hal yang telah dilakukan sehari-hari.

Pembahasan

BAPPEDA Aceh Barat menunjukkan etos kerja yang sangat tinggi dan tanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan, meskipun memiliki beban kerja yang cukup

besar. Etos kerja pegawai BAPPEDA Aceh Barat mencerminkan semangat kerja yang tinggi, tanggung jawab, kejujuran, dan amanah dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Meski memiliki jam kerja yang fleksibel, pegawai tetap menunjukkan kedisiplinan dalam menyelesaikan berbagai kegiatan seperti Musrembang, Renstra, dan penyusunan RPJMD. Berdasarkan konsep rasionalitas birokrasi Max Weber, kondisi ini menggambarkan penerapan prinsip *legal-rational authority*, di mana pegawai bekerja berdasarkan urutan, prosedur, dan pembagian kerja yang jelas. Sistem kerja yang tertata, memungkinkan setiap individu bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya yang menimbulkan keteraturan dalam birokrasi.

Etos kerja yang tinggi mendukung profesionalitas dan pencapaian tujuan organisasi secara sistematis. Dalam kerangka teori Max Weber, birokrasi yang rasional harus mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kesejahteraan individu yang menjadi bagian dari instansi. Beban kerja yang besar dengan tuntutan waktu fleksibel dapat menimbulkan kelelahan dan berpotensi mengurangi efektivitas kinerja. Rasionalitas formal dalam organisasi tidak selalu diukur melalui kecepatan dan hasil, melainkan juga melalui kemampuan organisasi untuk menjaga keseimbangan kerja dan menciptakan suasana kerja yang sehat. Dengan demikian, etos kerja yang tinggi tidak hanya menjadi beban, tetapi juga bagian dari komitmen moral untuk memberikan hasil kerja yang terbaik bagi masyarakat.

Budaya organisasi yang dibangun di BAPPEDA Aceh Barat didasarkan pada aspek profesionalitas, hierarki yang jelas, dan sistem kerja yang berlandaskan prinsip rasionalitas birokrasi. Struktur organisasi yang ideal memungkinkan setiap pegawai menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Nilai disiplin dan akuntabilitas menjadi pedoman utama dalam setiap proses kerja. Dalam pandangan Weber, kondisi ini mencerminkan rasionalitas formal yang menekankan pentingnya aturan tertulis, pembagian tugas, dan hierarki struktural yang jelas untuk mencapai efisiensi. Musyawarah yang diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan, seperti Musrembang, RPJMD, RJPD dan lainnya, menjadi bentuk adaptasi birokrasi rasional terhadap konteks sosial dan budaya lokal.

Budaya organisasi di BAPPEDA menunjukkan nilai keadilan, keterbukaan, profesionalitas dan tanggung jawab sosial. Pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada keputusan sepihak atau individu, melainkan didasarkan pada kesepakatan bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Budaya organisasi tersebut terbentuk dari sistem formal yang mengatur struktur dan juga dari nilai-nilai religius yang hidup di lingkungan kerja pegawai. Budaya organisasi berfungsi sebagai pedoman perilaku formal dan mekanisme sosial yang menumbuhkan rasa kebersamaan, akuntabilitas, dan orientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan dan bermartabat. Integrasi nilai-nilai Islam di BAPPEDA Aceh Barat merupakan ciri khas birokrasi daerah yang berlandaskan pada syariat Islam. Nilai-nilai seperti keadilan, keterbukaan, amanah, dan tanggung jawab tercermin dalam kegiatan sehari-hari. Dalam perspektif

birokrasi Weber, tindakan birokrasi tidak hanya mengikuti aturan tertulis, tetapi juga diilhami oleh nilai moral dan spiritual. Penerapan instruksi dari Gubernur Aceh yang mewajibkan seluruh ASN melaksanakan shalat berjamaah menunjukkan adanya sistem formal yang menginternalisasi nilai religius sebagai bagian dari etika kerja pegawai. Hal ini memperkuat sistem integrasi birokrasi dan meningkatkan rasa tanggung jawab individu terhadap tugasnya.

Penerapan nilai-nilai Islam pada BAPPEDA Aceh Barat dapat memperkuat kohesi sosial di lingkungan kerja dan menciptakan iklim organisasi yang harmonis. Integrasi nilai keagamaan dalam sistem birokrasi tidak mengurangi rasionalitas kerja, melainkan memperkaya makna rasionalitas itu sendiri. Weber menyatakan bahwa birokrasi rasional cenderung bersifat impersonal, namun berbeda dengan konteks BAPPEDA Aceh Barat, impersonalitas dilengkapi dengan dimensi spiritual yang dapat menumbuhkan empati, kejujuran, dan kepedulian antarpegawai. Nilai Islam menjadi dasar moral yang mengarahkan pegawai untuk bekerja demi kepatuhan pada aturan dan demi tanggung jawab religius. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam di BAPPEDA Aceh Barat menunjukkan model birokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada keseimbangan antara rasionalitas kerja dan moralitas keagamaan.

5. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa etos kerja, budaya organisasi dan integrasi nilai-nilai Islam di BAPPEDA Aceh Barat berjalan seiring dalam membentuk pola birokrasi yang rasional sekaligus bernilai moral. Etos kerja pegawai yang tinggi ditandai dengan kedisiplinan, tanggung jawab dan profesionalitas yang kuat meskipun dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang kompleks. Budaya organisasi menunjukkan pengaruh kuat terhadap nilai-nilai yang menekankan pada nilai keadilan, keterbukaan, profesionalitas dan tanggung jawab sosial. Penerapan nilai-nilai Islam dapat memperkuat kohesi sosial di lingkungan kerja dan menciptakan iklim organisasi yang harmonis. Integrasi nilai keagamaan dalam sistem birokrasi tidak mengurangi rasionalitas kerja, melainkan memperkaya makna rasionalitas.

Penelitian ini hanya berfokus pada satu instansi, sehingga generalisasi temuan yang didapat menjadi terbatas. Analisis dengan teori rasionalitas birokrasi dalam nilai-nilai Islam yang memberikan perspektif baru terhadap dinamika budaya organisasi di BAPPEDA Aceh Barat. Hasil penelitian juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian birokrasi berbasis nilai lokal dan religius di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif antarinstansi untuk melihat variasi pengaruh integrasi nilai Islam terhadap kinerja kelembagaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 44–64.
- Amrides, A. (2019). Rasionalitas dalam Manajemen Organisasi Masjid: Kasus pada Masjid Jogokaryan Yogyakarta. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 3(1), 97–110.
- Anas, R., & Hanani, S. (2024). Idealtipe Birokrasi Weberian Dalam Sistem Pendidikan: Implikasi Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Manajemen. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(1), 128–141.
- Darlian, C. I. R., Melayu, H. A., & Jalil, H. A. (2025). Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok-Pokok Syari'at Islam: Telaah Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah. *As-Siyadah*, 5(1), 25–43.
- Devi, I., Hanani, S., Syafitri, A., & Harahap, N. I. Y. (2023). Birokrasi dan struktur kekuasaan dalam organisasi pendidikan modern: Dengan pendekatan Max Weber. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 268–281.
- Fadila, O. A., Mahrizal, M., & Khalijah, S. (2021). Efektivitas peran bappeda dalam pembangunan kota medan. *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 7(2), 133–144.
- Limbong, D. (2021). *Peran Bappeda Dalam Penerapan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pemendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Studi Pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara)*. Universitas Medan Area.
- Makmur, M., Gusvita, M., Robi'ah, R., Rahmawati, D., Muslimin, M., & Aji, Y. A. (2025). Penerapan nilai-nilai Islam dalam etika profesi kesekretariatan di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Al-Fikrah*, 14(1), 1–15.
- Nahwan, D., Munir, S., & Riyanto, S. (2024). Pengembangan Model Kepemimpinan Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. *JIMP: Jurnal Ilmiah Manajemen Profetik*, 2(2), 50–60.
- Nasir, M. (2023). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023. *Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP)*, 1(2), 22–33.
- Nasura, M. D. (2025). Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Menuju Pelayanan Publik Yang Berpusat Pada Rakyat. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 676–693.

- Nuzulla, I., & Mubarak, I. (2023). Pengaruh kepemimpinan berbasis nilai-nilai Islam dalam efektivitas manajemen komunikasi organisasi. *Student Research Journal*, 1(6), 249–261.
- Pebriansyah, A., Hattab, S., & Rivai, A. (2024). Kinerja Pegawai Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 40–52.
- Rizki, M. A. (2025). Sharia-Based Public Service Administration in Aceh: A Normative-Conceptual Study from an Islamic Perspective. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, 2(1), 33–52.
- Ruki, M. N. (2024). *Faktor-faktor kunci dalam kepuasan kerja dan kinerja pegawai*. Deepublish.
- Saleh, M. (2024). Etika Komunikasi Islami: Solusi Untuk Kesuksesan Organisasi. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 14(1), 27–46.
- Sinaga, A. Z. (2024). Implementasi prinsip good governance dalam program kerja Bappeda Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 36–43.
- Siregar, K. H. (2020). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan. *JURNAL VISI EKONOMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN*, 2(2), 1–19.
- Solong, H. A., & Yadi, A. (2021). *Kajian Teori Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Deepublish.
- Sutrisno, E. R., SE, D. R. V. P. K. L., & SE, D. R. O. S. N. (2022). *Pelaksanaan sistem kerja work from home bagi aparatur sipil negara*. uwais inspirasi indonesia.
- Yasir, M., & Maulida, N. (2022). Pengaruh Nilai-nilai Islam terhadap Budaya Organisasi. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 1(1), 26–30.
- Yusuf, M., Mutohar, P. M., & Fuadi, I. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Etik dalam Membentuk Efektifitas Budaya Organisasi Lembaga Pendidikan. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 17–36.